



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/ 2388/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana pembentukan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program tersebut diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 31 Desember 2024



BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                          | MATERI POKOK                                                                                                | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                    | OPD    | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                  |                                                                                                             | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                               |        |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                              | (4)                                                                                                         | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                           | (9)    | (10)               | (11)       |
| 1.  | Perbup | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                   | Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan                                | ✓      |           | 2025        | Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun setelah selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited selesai | BPPKAD | Mei 2025           |            |
| 2.  | Perbup | Penjabaran APBD 2026                                             | Penjabaran APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah                          | ✓      |           | 2025        | Perbup Penjabaran APBD disusun setelah Perda APBD ditetapkan, yaitu maksimal bulan Desember tahun n-1                                                         | BPPKAD | Desember 2025      |            |
| 3.  | Perbup | Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2026 | Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan         | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar penilaian MCP KPK, Perbup Analisis Standar Belanja harus sudah ditetapkan maksimal 1 Juli                                                       | BPPKAD | April 2025         |            |
| 4.  | Perbup | Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2026     | Pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar penilaian MCP KPK, Perbup Standar Harga Satuan harus sudah ditetapkan maksimal 1 Juli                                                           | BPPKAD | April 2025         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                  | MATERI POKOK                                                                                                               | STATUS |                 | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD                                                                                      | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                          |                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN BAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                     |
| (1) | (2)    | (3)                                                      | (4)                                                                                                                        | (5)    | (6)             | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (9)                                                                                      | (10)               | (11)                                                                                                                                                                                |
|     |        | 2026                                                     | Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2026 |        |                 |             | sudah ditetapkan maksimal 1 Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Perbup | Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian                     | Balai Penyuluh Pertanian                                                                                                   | ✓      |                 | 2025        | Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dintanpan                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Perbup | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 | 1. Maksud dan tujuan<br>2. Ruang lingkup<br>3. Sistematika penyusunan<br>4. Pemantauan dan evaluasi                        | ✓      |                 | 2025-2029   | Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, didalam pada Pasal 13 dinyatakan salah satu tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 5 tahun. Di dalam Pasal 20 juga menyatakan RPKD kabupaten menjadi bagian dari RPJMD | 1. Bappeda<br>2. Dinsos PPKB<br>3. Dinper-mades<br>4. Dinduk-capil<br>5. Dinas Kesehatan | Januari 2025       | 1. Dokumen RPKD 2025-2029 telah selesai disusun<br>2. TKPKD Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati Nomor 400.9.10/1318/2024 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Rembang Tahun 2024 |
| 7.  | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati                          | 1. Pembentukan dan keanggotaan                                                                                             |        | ✓               | 2025        | Penyusunan Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Bappeda<br>2. Dinsos                                                                  | Maret 2025         |                                                                                                                                                                                     |



| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                                       | MATERI POKOK                                                                                                               | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OPD                                                            | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     |       |                                                                                                               |                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                    |            |
| (1) | (2)   | (3)                                                                                                           | (4)                                                                                                                        | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9)                                                            | (10)               | (11)       |
|     |       | Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang | 2. Tata kerja<br>3. Penyelarasan kerja<br>4. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia<br>5. Pendanaan<br>6. Pelaporan |        |           |             | tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang disusun untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sehingga diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang | PPKB<br>3. Dinpermades<br>4. Dindukcapil<br>5. Dinas Kesehatan |                    |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                   | MATERI POKOK                                                                                                                                           | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OPD                                                                                                         | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                           |                                                                                                                                                        | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                       | (4)                                                                                                                                                    | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (9)                                                                                                         | (10)               | (11)       |
| 8.  | Perbup | Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029 | 1. Visi dan Misi Pembangunan SPAM<br>2. Sasaran Pembangunan SPAM<br>3. Arah Kebijakan dan Strategi<br>4. Kerangka Pendanaan<br>5. Kerangka Kelembagaan | ✓      |           | 2025        | <p>Jakstrada kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM di kabupaten dalam meningkatkan akses air minum untuk mencapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>JAKSTRADA-SPAM bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif</p> | 1. DPUTaru<br>2. Dinkes<br>3. Dinper-mades<br>4. Bagian Hukum<br>5. Bagian Pereko-nomian dan SDA<br>6. PDAM | September 2025     |            |
| 9.  | Perbup | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum                                 | 1. Rencana Umum<br>2. Rencana Jaringan<br>3. Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk<br>4. Kriteria dan standar               | ✓      |           | 2025        | <p>Rispam adalah dokumen perencanaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 1. DPUTaru<br>2. Dinkes<br>3. Dinper-mades<br>4. Bagian Hukum<br>5. Bagian Pereko-nomian dan SDA            | November 2025      |            |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                              | OPD     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                       |
|-----|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                            |                                                                                                                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                         |         |                    |                                                                  |
| (1) | (2)    | (3)                                        | (4)                                                                                                                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                     | (9)     | (10)               | (11)                                                             |
|     |        |                                            | pelayanan<br>5. Rencana sumber dan alokasi air baku<br>6. Skala prioritas pembangunan sumber air<br>7. Rencana keterpaduan dan prasarana dan sarana sanitasi                                     |        |           |             | periode, yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya | 6. PDAM |                    |                                                                  |
| 10. | Perbup | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, prakiraan maju | ✓      |           | 2025        | Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun                                      | 40 OPD  | Juni 2025          |                                                                  |
| 11. | Perbup | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026  | Renja PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat                 | ✓      |           | 2025        | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun                                       | 40 OPD  | Juli 2025          | Maksimal 1 (satu) bulan setelah penetapan Perbup RKPD Tahun 2026 |
| 12. | Perbup | Perubahan Rencana                          | Perubahan Rencana                                                                                                                                                                                |        | ✓         | 2025        | Dokumen perubahan                                                                                       | 40 OPD  | Juli 2025          |                                                                  |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                               | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                           | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                 | OPD        | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                     |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                            |            |                    |                                                                |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                    | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                        | (9)        | (10)               | (11)                                                           |
|     |        | Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025                                                                    | Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, Prakiraan maju                                   |        |           |             | perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun                                                 |            |                    |                                                                |
| 13. | Perbup | Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029                                                    | Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah | ✓      |           | 2025        | Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun                                                           | 40 OPD     | September 2025     | Maksimal 1 bulan setelah penetapan Perda RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 14. | Perbup | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Mengatur tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                            |        | ✓         | 2025        | Perlu penyesuaian dengan peraturan terbaru terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional | Dinkominfo | April 2025         |                                                                |
| 15. | Perbup | Komunitas Informasi Masyarakat                                                                        | Mengatur tentang tata kelola kemitraan                                                                                                                                                                                                 | ✓      |           | 2025        | Perlu peraturan terkait Komunitas Informasi                                                                | Dinkominfo | Maret 2025         |                                                                |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                       | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                             | OPD                                                                                              | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                        |                                                                                                  |                    |                                                                               |
| (1) | (2)    | (3)                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                    | (9)                                                                                              | (10)               | (11)                                                                          |
|     |        |                                                               | komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat (kelembagaan, pemetaan, kolaborasi kegiatan dan monitoring evaluasi efektifitas diseminasi informasi)                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |             | Masyarakat                                                                             |                                                                                                  |                    |                                                                               |
| 16. | Perbup | Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (PPM) | Peraturan pelaksanaan ditingkat daerah tentang pengurangan dan penghapusan merkuri, sebagai mandat Pepres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Pengurangan dan Penghapusan Merkuri bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan dari emisi dan lepasan akibat merkuri dan senyawa merkuri yang berasal dari manusia | ✓      |           | 2025        | Peraturan Bupati untuk pengurangan dan penghapusan merkuri, diintegrasikan dalam RPJMD | 1. DLH<br>2. DKK<br>3. Dinperin naker (apabila ada industri yang menggunakan/melepaskan merkuri) | Juli 2025          | Usulan Tahun 2024 mundur ke Tahun 2025 karena ada revisi kajian dari Provinsi |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                            | MATERI POKOK                                                                                                       | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OPD | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|
|     |        |                                                                    |                                                                                                                    | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                | (4)                                                                                                                | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (9) | (10)               | (11)       |
| 17. | Perbup | Pemanfaatan Fasilitas Publik Alun-alun Rembang dan Alun-alun Lasem | Peraturan pelaksanaan di tingkat daerah tentang pemanfaatan fasilitas publik alun-alun Rembang dan alun-alun Lasem | ✓      |           | 2025        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alun-alun sebagai pusat area publik</li> <li>- Prosedur penggunaan alun-alun</li> <li>- Tugas dan tanggung jawab DLH</li> <li>- Tugas dan tanggung jawab pemohon</li> <li>- Menerangkan ketentuan pemanfaatan/ peminjaman RTH alun-alun Rembang dan alun-alun Lasem</li> </ul>                                              | DLH | Mei 2025           |            |
| 18. | Perbup | Pengelolaan Jalur Hijau                                            | Peraturan pelaksanaan di tingkat daerah tentang perlindungan pohon peneduh turus jalan                             | ✓      |           | 2025        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi pohon peneduh turus jalan sebagai fungsi estetika, kenyamanan, keteduhan, keamanan dan penjerat polusi</li> <li>- Tugas dan tanggung jawab DLH dan peran serta masyarakat</li> <li>- Perlindungan pohon turus jalan</li> <li>- Prosedur permohonan pemangkasan/ pemotongan pohon</li> <li>- Tanggungjawab</li> </ul> | DLH | Mei 2025           |            |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                                        | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                             | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                             | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |                                              |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                      | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                    | (9)                     | (10)               | (11)                                         |
|     |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |        |           |             | pemohon atas pemangkasan/ pemotongan pohon - Menerangkan ketentuan perlindungan/ perawatan pohon turus jalan dan ketentuan penebangan pohon turus jalan yang diperbolehkan serta ketentuan sanksi bagi oknum perusak pohon turus jalan |                         |                    |                                              |
| 19. | Perbup | SOTK UPT Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten                                                                                                                      | Tupoksi pekerjaan UPT Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                 | ✓      |           | 2025        | Untuk menunjang dan sebagai pedoman melakukan suatu pekerjaan                                                                                                                                                                          | DLH                     | November 2025      |                                              |
| 20. | Perbup | Perubahan ke-5 atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Pengaturan kembali (penyesuaian) pemberian TPP Pegawai ASN, Penjabat Kepala Desa sebelumnya tidak diberikan TPP diubah, penyesuaian besaran TPP Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah dan Bagian PBJ Setda |        | ✓         | 2025        | Sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                                                                                    | Bagian Organisasi Setda | Januari 2025       |                                              |
| 21. | Perbup | Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di                                                                                                        | Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan                                                                                                                                                      | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di                                                                                                                                                                             | Bagian Organisasi Setda | Januari 2025       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                   | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                              |                         |                    |                                                                                                                                |
| (1) | (2)    | (3)                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                          | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                                           |
|     |        | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang                                    | Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penetapan Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan terkait                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |             | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang                                                      |                         |                    |                                                                                                                                |
| 22. | Perbup | Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang       | Penyesuaian Kelas Jabatan Pegawai ASN berdasarkan Validasi Hasil Persetujuan Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                                                                                | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Bagian Organisasi Setda | Januari 2025       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020                                                                                   |
| 23. | Perbup | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPERIDA | Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPERIDA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Rembang                                        | Bagian Organisasi Setda | Januari 2025       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPEDA |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                            | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                              | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                         |                         |                    |                                                                                                                                    |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                     | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                                               |
|     |        |                                                                                    | Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |             |                                                         |                         |                    |                                                                                                                                    |
| 24. | Perbup | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM            | Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar pembentukan BKPSDM Kabupaten Rembang      | Bagian Organisasi Setda | Januari 2025       | Mencabut Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD |
| 25. | Perbup | Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada DINSOSPPKB Kabupaten Rembang | Pembentukan UPTD PPA pada DINSOSPPKB untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak                                                                                                                                                                                                 | ✓      |           | 2025        | Sebagai dasar pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Rembang | Bagian Organisasi Setda | Februari 2025      |                                                                                                                                    |
| 26. | Perbup | Sistem Kerja                                                                       | Penyesuaian sistem kerja sebagai tindak                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓      |           | 2025        | Sistem kerja baru dengan                                | Bagian Organisasi       | Maret 2025         |                                                                                                                                    |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                             | MATERI POKOK                                                                                                                                                               | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                   | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                     |                                                                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                              |                         |                    |                                                                                                         |
| (1) | (2)    | (3)                                                                 | (4)                                                                                                                                                                        | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                          | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                    |
|     |        |                                                                     | lanjut penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi        |        |           |             | pembentukan tim-tim kerja.                                                   | Setda                   |                    |                                                                                                         |
| 27. | Perbup | Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang | Pengaturan kembali Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.                          | ✓      |           | 2025        | Sebagai pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah            | Bagian Organisasi Setda | April 2025         | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah |
| 28. | Perbup | Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang        | Pengaturan kembali Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | ✓      |           | 2025        | Sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah | Bagian Organisasi Setda | Mei 2025           | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Daerah                   |
| 29. | Perbup | Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Pegawai              | Penyesuaian Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah                                                                                                                   | ✓      |           | 2025        | Sebagai pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi                            | Bagian Organisasi Setda | Juni 2025          | Mencabut Peraturan Bupati Nomor                                                                         |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                                 | MATERI POKOK                                                                                                                                          | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                      | OPD                                            | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                 |                                                |                    |                                                                                      |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                   | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                             | (9)                                            | (10)               | (11)                                                                                 |
|     |        | ASN Daerah                                                                                                                                              | Daerah dan Pegawai ASN Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN |        |           |             | Pemerintah dan Pegawai ASN Daerah                                                                                                                               |                                                |                    | 59 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. |
| 30. | Perbup | Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Pengaturan teknis/tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja Pegawai ASN, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah     | ✓      |           | 2025        | Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Bagian Organisasi Setda                        | Juli 2025          |                                                                                      |
| 31. | Perbup | Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada DINPERINNAKER                                                                                                  | Mengubah status UPT BLK pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                                                     |        | ✓         | 2025        | Mengubah status UPT BLK pada DINPERINNAKER                                                                                                                      | 1. Bagian Organisasi Setda<br>2. Dinperinnaker | Agustus 2025       |                                                                                      |
| 32. | Perbup | UPT Pengelolaan Sampah                                                                                                                                  | Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah                                                                                                       |        | ✓         | 2025        | Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah                                                                                                                 | 1. Bagian Organisasi Setda<br>2. Dinperinnaker | September 2025     |                                                                                      |
| 33. | Perbup | Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029                                                                                          | Penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan                        | ✓      |           | 2025        | Sebagai pedoman implementasi RB Pemda dan Perangkat Daerah berdasar pada RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat                                        | Bagian Organisasi Setda                        | Oktober 2025       | Menggantikan Road Map RB Pemda Tahun 2021-2026                                       |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                   | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                    | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                            | OPD           | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                               |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |                                                                                                          |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                             | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                   | (9)           | (10)               | (11)                                                                                                     |
|     |        |                                                                                                                                           | reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025-2029    |        |           |             | Daerah                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |                                                                                                          |
| 34. | Perbup | Pinjaman lunak bagi usaha mikro melalui penugasan kepada PT. BPR BKK Lasem (PERSERODA), PT. BPR JATENG (PERSERO) dan PT. BPR BANK REMBANG |                                                                                                                                                                                                                                 | ✓      |           | 2025        | Pinjaman lunak BKK                                                                                                                                                                                                                    | Dindagkop UKM |                    | Raperbup ini akan ditindaklanjuti jika masuk APBD Tahun 2025/masih diusulkan dalam pembahasan RAPBD 2025 |
| 35. | Perbup | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan penataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pendataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pemutakhiran data</li> <li>- Pendaftaran pedagang kaki lima</li> <li>- Permohonan</li> </ul> | ✓      |           | 2025        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan penataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pendataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pemutakhiran data</li> <li>- Pendaftaran pedagang kaki lima</li> <li>- Permohonan tanda</li> </ul> | Dindagkop UKM | Desember 2025      |                                                                                                          |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                                  | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OPD               | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9)               | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                                                                          | tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima<br>- Penetapan lokasi pedagang kaki lima<br>- Relokasi pedagang kaki lima<br>- Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan<br>- Tata cara kelembagaan<br>- Perlindungan masyarakat<br>- Pengawasan dan evaluasi<br>- Pembinaan<br>- Tata cara pembayaran denda |        |           |             | daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima<br>- Penetapan lokasi pedagang kaki lima<br>- Relokasi pedagang kaki lima<br>- Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan<br>- Tata cara kelembagaan<br>- Perlindungan masyarakat<br>- Pengawasan dan evaluasi<br>- Pembinaan<br>- Tata cara pembayaran denda |                   |                    |            |
| 36. | Perbup | Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum:<br>- Lokasi parkir<br>- Pengelolaan parkir<br>- Tata cara pemungutan<br>- Tata cara penundaan pembayaran<br>- Tata cara pengurangan,                                                                                                                                                                                        | ✓      |           | 2025        | - Lokasi parkir tepi jalan umum meliputi ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir, dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka jalan<br>- Pengelolaan parkir dilaksanakan oleh                                                                                                                                                               | Dinas Perhubungan | Desember 2025      |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                     | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPD         | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
|     |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (9)         | (10)               | (11)       |
|     |        |                             | keringanan, dan pembebasan<br><br>Pelayanan tempat khusus parkir:<br>- Lokasi tempat khusus parkir<br>- Pengelolaan parkir<br>- Tata cara pemungutan<br>- Tata cara penundaan pembayaran<br>- Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan<br><br>Pelayanan Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal:<br>- Lokasi Terminal<br>- Tata cara pemungutan<br>- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran<br>- Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan |        |           |             | Dinas dan dibantu oleh Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Dinas<br>- Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas<br>- Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan berada di lokasi milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas<br>- Lokasi terminal adalah terminal tipe C di Kabupaten Rembang |             |                    |            |
| 37. | Perbup | Monev Mandiri Perdesaan dan | Pedoman Pelaksanaan Monev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓      |           | 2025        | Penguatan pelaksanaan monev                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dinpermades | Juli 2025          |            |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                           | MATERI POKOK                                                      | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                           | OPD              | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|     |        |                                                                   |                                                                   | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                      |                  |                    |                       |
| (1) | (2)    | (3)                                                               | (4)                                                               | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                  | (9)              | (10)               | (11)                  |
|     |        | Keterbukaan Informasi Publik (MMP-KIP)                            | Mandiri Perdesaan dan Keterbukaan Informasi Publik                |        |           |             | berbasis masyarakat (partisipatif) dan publikasi hasil pelaksanaan monev melalui media cetak, elektronik dan digital |                  |                    |                       |
| 38. | Perbup | Batas Wilayah Desa                                                | Batas Wilayah dan Peta Desa                                       | ✓      |           | 2025        | Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa                                           | Dinpermades      | Oktober 2025       | 173 Perbup Batas Desa |
| 39. | Perbup | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                   | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa           | ✓      |           | 2025        | Memberikan penjelasan terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                                | Dinpermades      | Oktober 2025       |                       |
| 40. | Perbup | Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)                             | Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa                         | ✓      |           | 2025        | Memberikan penjelasan tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)                                        | Dinpermades      | Oktober 2025       |                       |
| 41. | Perbup | Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | ✓      |           | 2025        | Memberikan kejelasan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                               | Dinpermades      | Oktober 2025       |                       |
| 42. | Perbup | Teknis Penggunaan Dana Desa                                       | Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa                              | ✓      |           | 2025        | Menjelaskan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa                                                                     | Dinpermades      | Oktober 2025       |                       |
| 43. | Perbup | Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan                  | Perencanaan PBJ, Pelaksanaan PBJ, Pengelolaan LPSE,               | ✓      |           | 2025        | Pengaturan dan penguatan pengelolaan PBJ di                                                                          | Bagian PBJ Setda | Juni 2025          |                       |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                     | MATERI POKOK                                                                          | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                       | OPD                   | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                             |                                                                                       | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                  |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                         | (4)                                                                                   | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                              | (9)                   | (10)               | (11)                                                                                                                                                                                                                 |
|     |        | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                                                                | SDM dan Advokasi PBJ                                                                  |        |           |             | Kabupaten Rembang                                |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 44. | Perbup | Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS                                                                                                             | Pelaksanaan mutasi                                                                    | ✓      |           | 2025        | Menunggu regulasi dari pusat (Menpan RB dan BKN) | BKD                   | Juli 2025          |                                                                                                                                                                                                                      |
| 45. | Perbup | Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                                                                     | Tata cara pengisian kekosongan JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | ✓      |           | 2025        | Menunggu regulasi dari pusat (Menpan RB dan BKN) | BKD                   | Juli 2025          |                                                                                                                                                                                                                      |
| 46. | Perbup | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang | 1. Tata kelola korporasi<br>2. Tata kelola klinik                                     |        | ✓         | 2025        |                                                  | RSUD dr. R. Soetrasno | April 2025         | Perubahan:<br>1. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD dr. R. Soetrasno Rembang<br>2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2009 tentang |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                | OPD                | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                     |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|     |        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                                                |
| (1) | (2)    | (3)                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                       | (9)                | (10)               | (11)                                           |
|     |        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    | Pola Tata Kelola RSUD dr. R. Soetrasno Rembang |
| 47. | Perbup | Pelaksanaan Penegakan Ketertiban Umum di Kabupaten Rembang | Penegakan ketertiban umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓      |           | 2025        | Pelaksanaan Penegakan Ketertiban Umum di Kabupaten Rembang                                                                                                                                                                                                | Satpol PP          | Juli 2025          |                                                |
| 48. | Perbup | Penyelenggaraan Bantuan Hukum                              | a. Pelaksanaan Bantuan Hukum;<br>b. Pemberi Bantuan Hukum;<br>c. Penerima Bantuan Hukum;<br>d. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;<br>e. Penganggaran Dana Bantuan Hukum;<br>f. Pelaporan Bantuan Hukum;<br>g. Standar Bantuan Hukum;<br>h. Larangan;<br>i. Pengawasan;<br>j. Pendanaan;<br>k. Sanksi Administratif;<br>l. Ketentuan Penutup. | ✓      |           | 2025        | a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;<br>b. mewujudkan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan<br>c. memberikan hak kompensasi kepada pemberi Bantuan Hukum. | Bagian Hukum Setda | Januari 2025       |                                                |
| 49. | Perbup | Penjelasan Perda KTR                                       | Penjelasan Kawasan Bebas Bebas Asap Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓      |           | 2025        | Penjelasan terkait Perda KTR                                                                                                                                                                                                                              | Dinas Kesehatan    | Februari 2025      |                                                |
| 50. | Perbup | Perubahan atas                                             | Unit Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ✓         | 2025        | Perubahan dan                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Dinas           | Februari 2025      |                                                |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                         | MATERI POKOK                                                       | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                        | OPD                                | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                 |                                                                    | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                   |                                    |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                             | (4)                                                                | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                               | (9)                                | (10)               | (11)       |
|     |        | Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah | Sekolah/Madrasah                                                   |        |           |             | pembaharuan peraturan terkait Unit Kesehatan Sekolah dan Madrasah | Kesehatan<br>2. Dindikpora         |                    |            |
| 51. | Perbup | Inovasi FKD dalam RDS Kabupaten                                                                 | Kader Kesehatan                                                    | ✓      |           | 2025        | Inovasi Kader Forum Kesehatan Desa/ Kelurahan dan Posyandu        | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Kecamatan | Februari 2025      |            |
| 52. | Perbup | Inovasi Kabeh Marem STBM                                                                        | Kabupaten Sehat                                                    | ✓      |           | 2025        | Inovasi terkait Tim STBM                                          | Dinas Kesehatan                    | Februari 2025      |            |
| 53. | Perbup | Inovasi Telponi AKI/AKB                                                                         | Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi                               | ✓      |           | 2025        | Inovasi Tim Telponi Kematian Ibu dan Bayi                         | Dinas Kesehatan                    | Februari 2025      |            |
| 54. | Perbup | Inovasi Telponi Stunting                                                                        | Penanggulangan Balita Stunting                                     | ✓      |           | 2025        | Inovasi Tim Telponi Balita Stunting                               | Dinas Kesehatan                    | Februari 2025      |            |
| 55. | Perbup | Inovasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis                                                  | Percepatan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis                | ✓      |           | 2025        | Inovasi Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis           | Dinas Kesehatan                    | Februari 2025      |            |
| 56. | Perbup | Penyelenggara Jamaah Haji                                                                       | Pembentukan Tim Kesehatan Jamaah Haji                              | ✓      |           | 2025        | Tim Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji                         | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Kemenag   | Februari 2025      |            |
| 57. | Perbup | Standar Pelayanan Minimum                                                                       | Standar Pelayanan Tahun 2025                                       | ✓      |           | 2025        | Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Tahun 2025                    | Dinas Kesehatan                    | Februari 2025      |            |
| 58. | Perbup | Tarif Layanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan                                                     | Perubahan Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan | ✓      |           | 2025        | Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan          | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Puskesmas | Februari 2025      |            |
| 59. | Perbup | Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan                          |                                                                    | ✓      |           | 2025        |                                                                   | BPPKAD                             | Januari 2025       |            |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                                              | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPD           | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (9)           | (10)               | (11)       |
|     |        | Perkotaan                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |            |
| 60. | Perbup | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ✓         | 2025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BPPKAD        | Januari 2025       |            |
| 61. | Perbup | Lembaga Kemasyarakatan Desa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dinpermades   | Januari 2025       |            |
| 62. | Perbup | Pedoman Pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inspektorat   | Februari 2025      |            |
| 63. | Perbup | Pelayanan Tera dan Tera Ulang                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Tera dan Tera ulang</li> <li>- Penggolongan UTPP berdasarkan kewajiban tera</li> <li>- Pembiayaan kegiatan tera dan tera ulang</li> <li>- Hubungan kerja dengan pihak ketiga</li> <li>- Pengawasan terhadap UTPP, BDKT dan satuan ukuran</li> </ul> | ✓      |           | 2025        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang lingkup, tata cara, pelaksana</li> <li>- Pembagian terhadap UTPP yang wajib dan bebas tera dan tera ulang</li> <li>- Pembebanan pembiayaan pelayanan tera dan tera ulang</li> <li>- Pemberian wewenang dan izin pelaksanaan reparasi UTPP</li> </ul> | DINDAGKOP UKM | Februari 2025      |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                  | MATERI POKOK | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                              | OPD    | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                          |              | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                         |        |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                      | (4)          | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                     | (9)    | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                                          |              |        |           |             | oleh pihak ketiga<br>- Pengawasan terhadap penggunaan UTTP, pelabelan BDKT dan penggunaan satuan ukuran oleh masyarakat |        |                    |            |
| 64. | Perbup | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah                                                |              | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                         | BPPKAD | Februari 2025      |            |
| 65. | Perbup | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet                                   |              | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                         | BPPKAD | Februari 2025      |            |
| 66. | Perbup | Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                          |              | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                         | BPPKAD | April 2025         |            |
| 67. | Perbup | Tata Cara Pemberian Keringanan Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah |              | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                         | BPPKAD | April 2025         |            |
| 68. | Perbup | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB                                                        |              | ✓      |           | 2025        |                                                                                                                         | BPPKAD | April 2025         |            |



| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                     | MATERI POKOK                                                  | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OPD     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                             |                                                               | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                         | (4)                                                           | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9)     | (10)               | (11)       |
| 69. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah              | Bagan Akun Standar (BAS)                                      |        | ✓         | 2025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BPPKAD  | Juni 2025          |            |
| 70. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                               |        | ✓         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BPPKAD  | Januari 2025       |            |
| 71. | Perbup | Tata Cara Pemungutan Retribusi PBG                                                                          | Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi PBG | ✓      |           | 2025        | Untuk mengatur:<br>1. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi PBG<br>2. Keberatan akan Ketetapan Retribusi, serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi<br>3. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi<br>4. Kelebihan Pembayaran Retribusi<br>5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran | DPUTARU | Maret 2025         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                    | MATERI POKOK                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                           | OPD     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
|     |        |                                                            |                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                      |         |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                        | (4)                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                  | (9)     | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                            |                                                  |        |           |             | Retribusi<br>6. Pelaporan<br>Retribusi<br>Pembukuan dan<br>Pemeriksaan                                                                                                                               |         |                    |            |
| 72. | Perbup | Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rembang | Rencana Peruntukan Kawasan dan Pengaturan Zonasi | ✓      |           | 2025        | Untuk mengatur:<br>1. Rencana Struktur Ruang<br>2. Rencana Pola Ruang<br>3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang<br>4. Peraturan Zonasi<br>5. Kelembagaan<br>6. Ketentuan lain-lain<br>7. Ketentuan Peralihan | DPUTARU | Juli 2025          |            |



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ